



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TITY YUKRISNA
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 681225

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.210.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 490 m2/490 m2 di KAB / KOTA KAPUAS, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1.200 m2/1.200 m2 di KAB / KOTA GUNUNG MAS, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 170 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
5. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **133.500.000**

1. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
2. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
4. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **201.800.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	115.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.660.300.000
III. HUTANG	Rp.	4.350.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.655.950.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.